



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2021



Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : www.dpmptsp.gresikkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732/3930733
G R E S I K

PERATURAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010 - 2030;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan
20. Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 4 JUL 2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1001

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja tahun keenam atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini mengakomodasi amanat Undang-

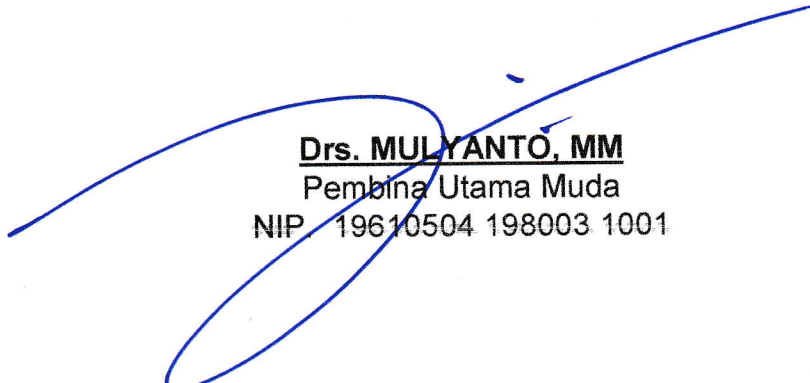
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gresik,

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		iii	
DAFTAR TABEL		iv	
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	5
		1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD	8
		TAHUN LALU	
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	29
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	42
		3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
		Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah	58
BAB V	:	PENUTUP	63
LAMPIRAN	:	MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2021	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota	2
Tabel 2	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	8
Tabel 3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Guna Pencapaian Sasaran	9
Tabel 4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2018	10
Tabel 5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021	23
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2012-2018	24
Tabel 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Penerbitan Izin PTSP	25
Tabel 8	Pencapaian PAD	28
Tabel 9	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020	31
Tabel 10	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Gresik	37
Tabel 11	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	41
Tabel 12	Rekapitulasi Program dan Kegiatan	45
Tabel 13	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPM PTSP Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	52
Tabel 14	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	59

BAB I

PENDAHULUAN

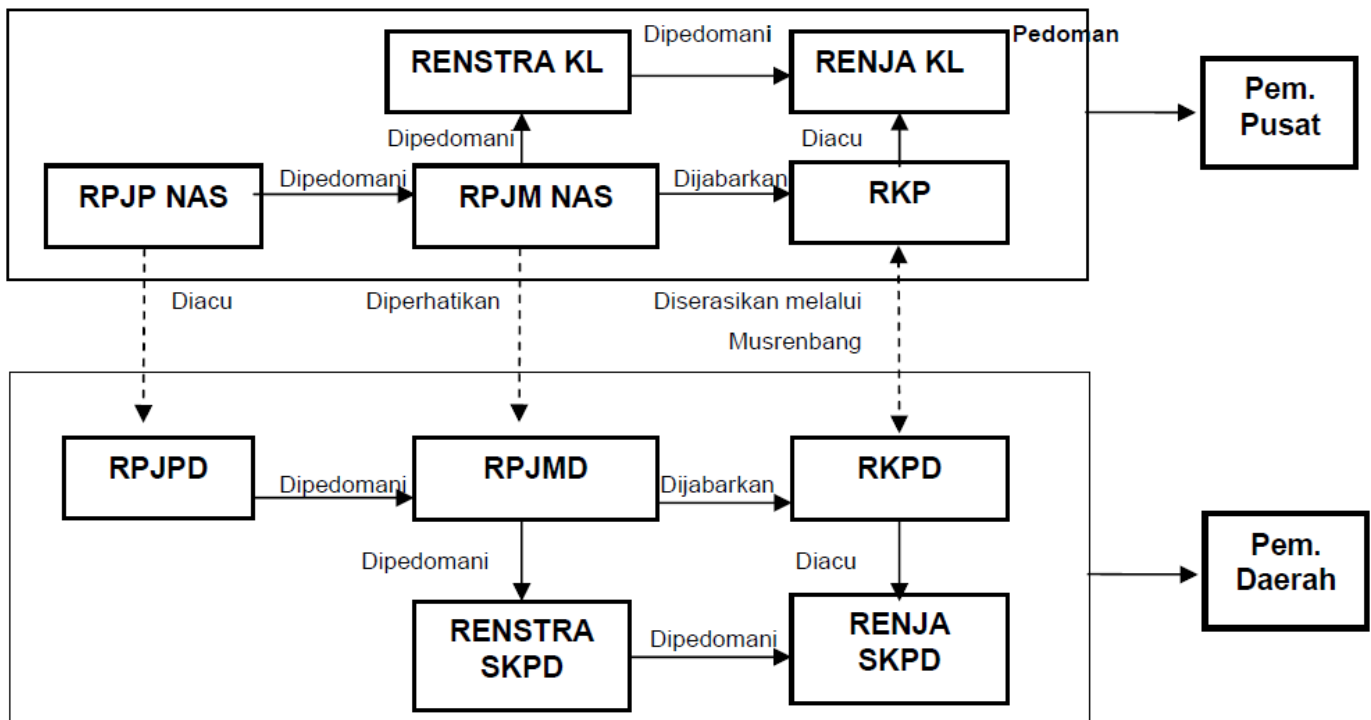
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja DPMPTSP dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota:

**KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKP, RENSTRA, RENJA K/L
DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**
(Tabel 1)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah untuk ketigakalinya dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2021 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2021.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2021 dan DPA OPD Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat enjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

3. Pada Bab III berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
4. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
5. Bab V berisikan uraian penutup berupa: catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 15.926.225.225,- yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 8.023.190.225,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 7.903.035.000,- sedangkan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 6.225.496.814,- (77,59%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.742.074.973,- (97,96%) dari rencana. Dengan demikian, jika Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 54.682.855.095,- maka terjadi surplus sebesar Rp. 40.715.283.308 (lihat pada tabel berikut ini) :

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (Tabel 2)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
4.	Pendapatan	52.081.518.668	54.682.855.095	104.99	52.984.350.982,8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	52.081.518.668	54.682.855.095	104.99	52.984.350.982,8
4.1.2	Retribusi Daerah	51.750.000.000	54.226.384.829	104.79	52.984.350.982,8
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	331.518.668	456.470.226	137.69	550.182.943,8
5	Belanja Daerah	15.926.225.225	13.967.571.787	87.70	10.073.740.712
5.1.	Belanja Tidak Langsung	7.903.035.000	7.742.074.973	97.96	6.157.747.093
5.1.1	Belanja Pegawai	7.903.035.000	7.742.074.973	97.96	6.157.747.093
5.2.	Belanja Langsung	8.023.190.225	6.225.496.814	77.59	3.915.993.619
5.2.1.	Belanja Pegawai	430.421.000	403.923.000	93.84	576.554.825
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.047.479.225	3.464.793.053	68.64	3.051.558.544
5.2.3.	Belanja Modal	2.545.290.000	2.356.780.761	92.59	287.880.250
	SURPLUS/ (DEFISIT)	36.155.293.443	40.715.283.308		42.910.610.270,8

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp.8.023.190.225,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
GUNA PENCAPAIAN SASARAN**
(Tabel 3)

NO	SASARAN	TARGET KEUANGAN 2019	REALISASI 2019		KET.
			(Rp)	%	
1	Meningkatnya angka investasi	1.131.302.800	978.451.826	86.49	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1.045.793.800	760.141.401	72.69	
TOTAL		2.177.096.600	1.738.593.227	79.86	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah sebesar 79.86 %.

Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 5.846.093.625 dan teralisasi sebesar Rp. 4.486.903.587 atau 76.75 %.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Kabupaten Gresik
(Tabel 4)**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.2.12.1.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	92,06%			60,48%
1.2.12.1.2.12.01.01.002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	66 jenis	32 jenis	11 jenis	10 jenis	90.91	12 jenis	42 jenis	63,64
1.2.12.1.2.12.01.01.003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan bahan bacaan	24 jenis	15 jenis	3 jenis	3 jenis	100.00	5 jenis	18 jenis	20,83
1.2.12.1.2.12.01.01.005	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum	979 orang	360 orang	225 orang	211 orang	93.78	427 orang	571 orang	58,32
1.2.12.1.2.12.01.01.006	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas Dalam dan luar daerah	647 kali	275 kali	124 kali	124 kali	100.00	124 kali	399 kali	61,67
1.2.12.1.2.12.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah jasa administrasi kantor	118 orang	55 orang	21 orang	21 orang	100.00	2 orang	57 orang	48,00
1.2.12.1.2.12.01.01.008	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah jasa operasional kantor	48 orang	30 orang	34 orang	23 orang	67.65	26 orang	53 orang	110,42
1.2.12.1.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%			60,55%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.2.12.1.2.12.01.02.003	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	aparatur Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ ATK	318 item, 570 buah	444 unit	53 item, 95 buah	53 item	100.00	94 item	497 item	55,97
1.2.12.1.2.12.01.02.005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	48 macam pemeliharaan	20 macam pemeliharaan	6 macam pemeliharaan	6 macam pemeliharaan	100.00	6 macam pemeliharaan	26 macam pemeliharaan	54,16
1.2.12.1.2.12.01.02.006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2	79 unit	40 unit	13 unit	13 unit	100.00	14 unit	53 unit	67.08
1.2.12.1.2.12.01.02.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	Jumlah perawatan dan pemeliharaan mebelair dan computer	40 jenis	19 jenis	7 jenis	7 jenis	100.00	10 jenis	26 jenis	65,00
1.2.12.1.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			25,00%
1.2.12.1.2.12.01.05.001	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Jumlah In House Training dan Peningkatan Pelayanan Izin	8 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100.00	2 paket	2 kali	25,00
1.2.12.1.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%			88.98%
1.2.12.1.2.12.01.06.001	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen LAKIP	60 buku	30 buku	15 buku	15 buku	100.00	15 buku	45 buku	75,00
1.2.12.1.2.12.01.06.003	Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja	35 buku	20 buku	20 buku	20 buku	100.00	10 buku	40 buku	114,28

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.2.12.1.2.12.01.06.008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	240 buku	240 buku	-	-	-	-	240 buku	100.00
1.2.12.1.2.12.01.06.010	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	60 buku	30 buku	10 buku	10 buku	100.00	10 buku	40 buku	66,67
1.2.12.1.2.12.01.15	Program Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	5-10%	53.21 %	5-10%	93.75%	85.18%			100,05%
1.2.12.1.2.12.01.15.002	Forum Shareholders Investasi untuk Evaluasi Pelaksanaan Iklim Investasi	Jumlah gathering investor dan calon investor dan jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	750 orang	300 orang	170 orang	170 orang	100.00	1 kali dan 5 kecamatan	470 orang	62.67
1.2.12.1.2.12.01.15.003	Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Pengusaha Daerah dengan PMA PMDN serta Sektor Migas	Jumlah fasilitasi bisnis antara UMKM dan PMA – PMDN	850 peserta	340 peserta	120 peserta	120 peserta	100.00	2 kali	460 peserta	54,12
1.2.12.1.2.12.01.15.004	Penyusunan Jaringan Kemitraan untuk Perluasan Investasi Usaha Kecil	Jumlah paket penyusunan jaringan kemitraan untuk perluasan investasi pengusaha kecil	5 buku	1 paket, 5 buku	5 buku	5 buku	100.00	2 kajian, 10 buku	15 buku	300,00
1.2.12.1.2.12.01.15.007	Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	6 tahun	2 tahun, 5 sarana dan prasarana	1 tahun	1 tahun	100.00	1 tahun	3 tahun	50,00
1.2.12.1.2.12.01.15.008	Peningkatan Promosi Investasi	Jumlah pameran investasi	11 kali pameran	4 kali pameran	2 kali pameran	2 kali pameran	100.00	2 kali pameran	6 kali pameran	54,55
1.2.12.1.2.12.01.15.010	Surveillance Audit Sistem Managemen Mutu International Organization For Standardization (ISO) 9001	Jumlah sertifikat ISO 9001:2015 pada Dinas Penanaman Modal	6 sertifikat	3 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	100.00	1 sertifikat	4 sertifikat	66,67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.2.12.1.2.12.01.15.011	Penyusunan Direktori Perusahaan di Kabupaten Gresik	dan PTSP Jumlah buku direktori perusahaan di Kab. Gresik	200 buku	442 buku	55 buku	55 buku	100.00	75 buku	497 buku	112,44
1.2.12.1.2.12.01.15.012	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Peraturan Penunjang Kebijakan Penanaman Modal	4 paket	2 paket, 4 kali	3 draft rancangan peraturan	2 draft rancangan peraturan	66.67	1. 1 draft rancangan peraturan dan 1 evaluasi SP dan SOP 2. 2 sosialisasi	4 paket	100,00
1.2.12.1.2.12.01.15.015	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Reklame	Jumlah peraturan penyelenggaraan reklame	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100,00
1.2.12.1.2.12.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya	75%	75%	75%	75%	105.41%			258,45%
1.2.12.1.2.12.01.16.001	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan dokumen yang terkait penanaman modal	4 buku	4 buku	-	-	-	-	4 buku	100,00
1.2.12.1.2.12.01.16.002	Verifikasi Perizinan Usaha	Jumlah pelaksanaan verifikasi perizinan	72 perusahaan	522 perusahaan	216 perusahaan	216 perusahaan	100.00	142 perusahaan	664 perusahaan	922.22
1.2.12.1.2.12.01.16.003	Operasional Pemeriksaan Lapangan	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan izin penanaman modal	140 survey (725 izin)	140 survey (725 izin)	-	-	-	-	140 survey (725 izin)	100,00
1.2.12.1.2.12.01.16.004	Monitoring Pelaksanaan Izin Blok Plan Perumahan dan	Jumlah laporan monitoring	30 buku	30 buku	-	-	-	-	30 buku	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pemanfaatan Lahan	pelaksanaan izin blok plan perumahan								
1.2.12.1.2.12.01.16.005	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal dari Penanam Modal/ Investor 2. Jumlah data realisasi investasi	1. 1400 pemohon 2. 20 triwulan, 10 semester	1. 933 pemohon 2. 4 triwulan, 2 semester	1. 250 perusahaan 2. 4 triwulan, 2 semester	1. 850 perusahaan 2. 4 triwulan, 2 semester	340.00	800 laporan	1733 laporan	124,00
1.2.12.1.2.12.01.16.006	Operasionalisasi Task Force Perizinan dan Help Desk	1. Jumlah peserta Forum Pertemuan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Forum Fasilitasi dan Konsultasi 2. Jumlah pemohon izin yang mengalami kendala persyaratan	49 pengaduan, 510 peserta	49 pengaduan, 285 peserta	-	-	-	-	49 pengaduan, 285 peserta	100,00
1.2.12.1.2.12.01.16.007	Penyusunan Evaluasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan	1. Jumlah peserta Forum Pertemuan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Forum Fasilitasi dan Konsultasi 2. Jumlah pemohon izin yang mengalami kendala	57 pengaduan	-	15 pengaduan	16 pengaduan	106.67	15 pengaduan	16 pengaduan	28,07

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.2.12.1.2.12.01.16.008	Operasional Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan	persyaratan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan	15 buku	-	30 perusahaan	89 perusahaan	296.67	30 perusahaan	89 perusahaan	593.33
1.2.12.1.2.12.01.17	Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan	75%	45.47%	75%	75%	152.21%			160.07%
1.2.12.1.2.12.01.17.001	Operasionalisasi Penerbitan IPPM, Izin Usaha dan Perkoperasian	Jumlah izin-izin yang terbit	1.980 izin	1.031 izin	370 izin	176 izin	47.57	120 izin	1.207 izin	60,96
1.2.12.1.2.12.01.17.002	Operasionalisasi Penerbitan SIUJK, Toko Modern dan Pasar Tradisional	Jumlah izin-izin yang terbit	1.300 izin	757 izin	250 izin	335 izin	134.00	150 izin	1.092 izin	84,00
1.2.12.1.2.12.01.17.003	Operasionalisasi Penerbitan Izin di Bidang Angkutan	Jumlah izin-izin yang terbit	490 izin	265 izin	85 izin	210 izin	247.06	60 izin	475 izin	96,93
1.2.12.1.2.12.01.17.004	Operasionalisasi Penerbitan Izin Usaha di Bidang Peternakan, Perikanan dan Izin Usaha Obat Tradisional	Jumlah izin-izin yang terbit	200 izin	-	25 izin	-	0.00	48 izin	-	0,00
1.2.12.1.2.12.01.17.005	Operasionalisasi Penerbitan Izin di Bidang Pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta, Kearsipan dan Sosial	Jumlah izin-izin yang terbit	750 izin	1.168 izin	150 izin	453 izin	302.00	200 izin	1.621 izin	216,13
1.2.12.1.2.12.01.17.006	Operasionalisasi Penerbitan Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah izin-izin yang terbit	500 izin	313 izin	100 izin	184 izin	184.00	100 izin	497 izin	99,40
1.2.12.1.2.12.01.17.007	Operasionalisasi Penerbitan Perizinan di Bidang Kesehatan	Jumlah izin-izin yang terbit	500 izin	535 izin	100 izin	216 izin	216.00	150 izin	751 izin	150,2
1.2.12.1.2.12.01.17.008	Operasionalisasi Pelayanan Non Perizinan	Jumlah rekomendasi/ non perizinan yang	20.150 rekom	7.099 rekom	5000 rekom	4.355 rekom	87.10	450 izin	11.454 rekom	57,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2019	Realisasi Renja OPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		diterbitkan								
1.2.12.1.2.12.01.18	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Persentase penyelesaian perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan	75%	60.47%	75%	75%	143.46%			108.26%
1.2.12.1.2.12.01.18.01	Operasional Pelayanan Perizinan Tata Ruang	Jumlah IPR, Izin Lokasi, Izin Reklame dan Rekomendasi Pertambangan	4.405 izin	3.402 izin	905 izin	1.353 izin	149.50	1.330 izin	4.755 izin	107,95
1.2.12.1.2.12.01.18.02	Operasional Pelayanan Perizinan Bangunan	Jumlah perizinan bangunan	3.150 berkas	1.643 izin	600 izin	694 izin	115.67	750 izin	2.337 izin	74,19
1.2.12.1.2.12.01.18.03	Operasional Pelayanan Perizinan Lingkungan	Jumlah Izin Gangguan (HO) dan Izin Lingkungan	1.330 izin	1.484 izin	250 izin	413 izin	165.20	425 izin	1.897 izin	142,63

Hambatan dan Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal antara lain :

- Ketersediaan lahan peruntukan industri yang semakin terbatas sedangkan peluang investasi masih sangat besar
- Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang proses perizinan
- Perubahan regulasi yang sangat cepat sehingga dalam penerapannya masih belum maksimal
- Masih banyak wilayah yang belum memiliki sehingga integrasi dengan sistem perizinan belum komprehensif
- Masih dijumpainya ketidaksinkronan regulasi sektoral dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- Kecenderungan nilai tukar rupiah yang tidak stabil
- Perekonomian global yang belum menentu
- Merebaknya pandemi COVID-19
- Kurangnya event promosi investasi
- Permasalahan perolehan lahan yang masih dijumpai
- NSPK kementerian teknis yang ada masih belum bisa pedoman dalam acuan penerapan prosedur yang mudah diikuti
- Sistem OSS belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan
- Database pada sistem aplikasi OSS belum terklasifikasi dengan jelas
- Pemetaan peluang investasi masih belum optimal
- Minimnya anggaran pelayanan
- Kompetensi SDM penanaman modal yang perlu ditingkatkan
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan data pelaporan perkembangan penanaman modal yang masih perlu ditingkatkan
- Masih dijumpainya pelanggaran regulasi penanaman modal

Beberapa strategi pemecahan masalah antara lain :

- Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal.
- Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.
- Meningkatkan efisiensi pelayanan akan dilakukan penyempurnaan organisasi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan IT untuk keperluan pengembangan *tracking system*, *on line service* dan jaringan intranet;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan insentif investasi berupa pemberian kemudahan persyaratan dan penerapan penerbitan izin secara paralel;
- Menerapkan investasi berwawasan lingkungan melalui pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup yang dituangkan dalam izin investasi, IMB dan Izin Lingkungan serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan;
- Menyelenggarakan pameran potensi investasi dan produk serta penyediaan informasi realisasi dan peluang investasi.
- Melaksanakan koordinasi guna pemecahan atas masalah-masalah pelayanan izin yang menghadapi kendala
- Melakukan peningkatan terobosan dalam pelayanan melalui pelaksanaan inovasi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah memberikan jasa pelayanan perizinan yang mana secara garis besar meliputi :

A. Penerimaan Permohonan Izin

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik akan menerima berkas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon selama berkas yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan lengkap.

B. Pemrosesan Permohonan Izin

Tahapan dalam pemrosesan Permohonan Izin yaitu :

- Pengecekan Kelengkapan Berkas Permohonan Izin
- Survey Lapangan/Survey Lokasi/Tinjauan Lapangan
- Rapat Tim Pokja dengan Pemohon
- Pembuatan Draft Surat Keputusan (SK) Izin
- Perhitungan Biaya Retribusi (SKR), untuk izin-izin dengan ketentuan pengenaan retribusi
- Penandatanganan/Pengesahan Surat Keputusan (SK) Izin
- Penomoran Surat Keputusan (SK) Izin

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
2. Izin Lokasi
3. Izin Blok Plan dan Perubahannya (Non OSS)
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non OSS
5. Izin Penyelenggaraan Reklame (Non OSS)
6. Rekomendasi Sarana dan Kesesuaian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Non OSS
7. Izin Lingkungan
8. Izin Pembuangan Air Limbah
9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan Limbah B3)
10. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3)
11. Izin Pendaaur Ulang Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta (Non OSS)
12. Pendaftaran Usaha Peternakan (Usaha Mikro dan Usaha Kecil)
13. Izin Usaha Peternakan
14. Pendaftaran Usaha Perkebunan
15. Izin Usaha Perkebunan
16. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
17. Izin Usaha Tanaman Pangan

18. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura (Usaha Mikro dan Usaha Kecil)
19. Izin Usaha Holtikultura
20. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Usaha Mikro Obat Tradisional (Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot))
21. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
22. Izin Toko Alat Kesehatan
23. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
24. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
25. Izin Operasional Klinik
26. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Laboratorium Klinik Umum Pratama)
27. Izin Apotek
28. Izin Toko Obat
29. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
30. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit
31. Izin Operasional Puskesmas (Non OSS)
32. Izin Penyelenggaraan Optikal (Non OSS)
33. Izin Usaha Jasa Konstruksi
34. Tanda Daftar Usaha Perorangan
35. Izin Usaha Industri
36. Izin Perluasan
37. Izin Usaha Kawasan Industri
38. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
39. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
40. Tanda Daftar Gudang
41. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (RKAPT) (Non OSS)
42. Surat Izin Menempati Stand-kios (SIM) Pasar (Non OSS)
43. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
44. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

45. Izin Pelabuhan Umum
46. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan (Perawatan Dan Perbaikan Kapal)
47. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
48. Izin Usaha Angkutan Laut (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)
49. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lintas Pelabuhan di dalam Kabupaten/Kota)
50. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten
51. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
52. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
53. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
54. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi
55. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas Dan Mendarat Helikopter (Heliport)
56. Izin Pengelolaan Parkir Dalam Gedung/Kawasan (Non OSS)
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
58. Sertifikat Usaha Pariwisata
59. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)
60. Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita (Non OSS)
61. Izin Koperasi Simpan Pinjam
62. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
63. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
64. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
65. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
66. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
67. Surat Izin Usaha Perikanan (Bidang Pembudidayaan)
68. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
69. Buku Kapal Perikanan
70. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
71. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
72. Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi)
73. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi)
74. Tanda Daftar Usaha Penggaraman bagi Pertambak Garam Kecil

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-2009 yaitu 5,6%) namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan II pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010- 2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan quantitative easing Amerika. Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (tapering off), lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Melambatnya perekonomian juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun realisasi investasi di Kabupaten Gresik tetap mengalami perkembangan yang menggembirakan dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2013 – 2019 seperti tampak pada tabel 6 dibawah.

Berikut disajikan pula deretan angka pada tabel 5 yang menunjukkan target dan realisasi pencapaian kinerja dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dipandang dari target program RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016 s.d. 2021 pada tahun 2018 sebagai pembanding atau review tahun lalu.

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik (Tabel 5)**

No	Misi/Perangkat Daerah/Urusan	Indikator	Satuan	Tahun 2019			
				Target	Realisasi	Penjelasan	Capaian (%)
	MISI III						
	PENANAMAN MODAL						
	PERANGKAT DAERAH PENANAMAN MODAL DAN PTSP						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	%	100	100	--	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	%	100	100	-	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	-	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	%	100	100	-	100
5	Program Pengembangan Iklim, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	5-10	84.09	-	840.9
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase verifikasi izin realisasi investasi	%	75	100	-	133.33
7	Program Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	Persentase penyelesaian izin perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan	%	75	97.52	-	130.02
8	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Persentase penyelesaian perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan	%	75	140.17	-	186.89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja 2019 berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 s.d. 2021 bahwasannya dari 8 (delapan) program telah mencapai target rata-rata sebesar 211.39. Artinya kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gresik dilihat dari sudut target pencapaian RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 s.d. 2021 dikategorikan SANGAT BAIK.

Pencapaian Kinerja Investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik Tahun 2013– 2019(Tabel 6)

NO	URAIAN	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rencana Investasi PMDN (juta rupiah)	15.445.440,60	17.158.985,2	24.639.278,4	13.952.621,8	9.662.187,8	8.547.595,7	-
2	Rencana Investasi PMA (US\$ ribu)	83.364,70	250.584,40	398.273,6	212.764,9	434.873,9	545.605,6	-
3	Realisasi Investasi PMDN (juta rupiah)	2.986.515,5	8.009.042,0	671.413,6	3.982.980,6	4.449.254,7	3.452.308,199	3.199.731
4	Realisasi Investasi PMA (US\$ ribu)	79.299,80	215.390,80	152.925,40	348.001	436.663,7	165.375,8	98.346,9

Untuk rencana investasi baik PMDN maupun PMA di tahun 2019 ini tidak dapat disajikan karena adanya perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) menjadi aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Seiring dengan perlambatan ekonomi, realisasi atas persetujuan investasi juga mengalami perlambatan. Hal inilah yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian di lingkup regional maupun nasional. Dari sektor penanaman modal dalam negeri, realisasi PMDN pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan dari tahun sebelumnya atau dari Rp. 3.452.308,199 di tahun sebelumnya menjadi Rp. 3.199.731 di tahun 2019. Demikian pula dengan investasi asing yang pertumbuhannya melambat 40,53% dari tahun sebelumnya sebesar 165.375,8 US\$

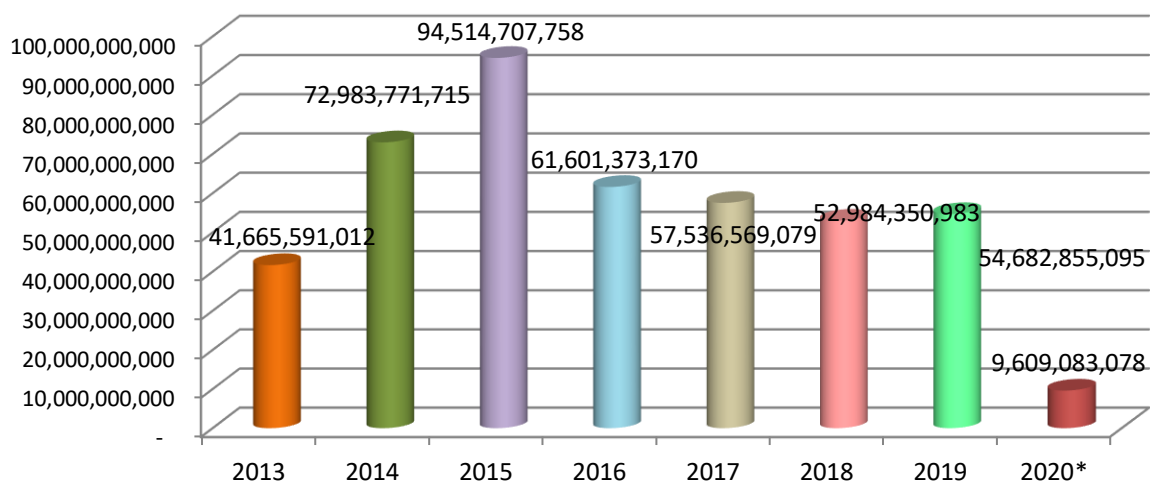
NO	JENIS IZIN	TAHUN
		2019
4	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	207
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Kursus Ketrampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A,B,C)	10
6	Izin Rumah Sakit :	-
	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit	4
	b. Izin Operasional Rumah Sakit	6
7	Izin Klinik	-
	a. Izin Mendirikan Klinik	-
	b. Izin Operasional Klinik	53
8	Izin Apotik	41
9	Izin Toko Obat	3
10	Izin Penyelenggaraan Optikal	6
11	Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama (Peset Control)	1
12	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga – SPP IRT)	103
13	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-
14	Izin Laboratorium	-
15	Izin Toko Alat Kesehatan	-
16	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	105
17	Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta	1
18	Surat Izin Operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta(SIO-LPTKS)	-
19	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	170
20	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita	10
21	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Pengumpulan Limbah B3	-
	a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	98
	b. Izin Pengumpulan Limbah B3	-
22	Izin Lingkungan	-
	a. Izin Lingkungan (untuk perusahaan yang wajib Amdal)	5
	b. Izin Lingkungan (untuk perusahaan yang wajib UKL UPL)	264
23	Izin Pembuangan Limbah Cair/Air Limbah	46
24	Izin Pendaaurulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	-
25	Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahan (melalui SPIPISE)	-
26	Izin Pemanfaatan Ruang	308
27	Izin Lokasi	117
28	Izin Tata Ruang (site plan/block plan) dan perubahannya	62
29	Izin Mendirikan Bangunan	632
30	Izin Gangguan (HO) (termasuk perubahan/balik nama/daftar ulang)	-
31	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan, Izin Akuisisi (melalui SPIPISE)	176
32	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-
33	Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap	291
34	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	637

NO	JENIS IZIN	TAHUN
		2019
35	Proses Rekomendasi Reklamasi	-
	a. Proses Rekomendasi Reklamasi	-
	b. Proses MOU/Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan HGB diatas HPL	-
36	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-
37	Rekomendasi Saran dan Kesesuaian Wilayah WIUP	-
38	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten	-
39	Izin Usaha Angkutan Orang	26
40	Izin Trayek Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	110
41	Izin Usaha Insidentil Angkutan Orang	-
42	Izin Operasional Taxi	-
43	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pariwisata	-
44	Rekomendasi Izin Angkutan Penumpang Sewa	-
45	Izin Angkutan Karyawan/Angkutan Sekolah	-
46	Izin Usaha Angkutan Barang	51
47	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	-
48	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	-
49	Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Gresik Bawean	1
50	Izin Operasi Penyeberangan Sungai di Wilayah Kabupaten Gresik	-
51	Izin Pengerukan (Dregging)	-
52	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-
53	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili	-
54	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten	-
55	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Usaha	-
56	Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	-
57	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-
58	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	-
59	Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-
60	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	-
61	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	-
62	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam Daerah Kabupaten	-
63	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-
64	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Apt Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-
65	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12
66	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-
67	Izin Usaha Perikanan	-
68	Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	-
69	Izin Usaha Peternakan	-
70	Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (poultry shop)	-
71	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)	-
72	Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)	-
73	Izin Usaha Toko Modern	-
74	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	-
75	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-
76	Surat Izin Menempati Stand Kios (SIM) : Daftar Ulang dan Baliknama	230

NO	JENIS IZIN	TAHUN
		2019
77	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-
78	Tanda Daftar Gudang	-
79	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-
80	Rekomendasi Penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar)	-
81	Tanda Daftar Industri (TDI)	-
82	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi (Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten)	-
83	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten)	-
84	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	-
85	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-
86	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten	-
SUB TOTAL		4021
87	Izin melalui On Line single Submission	4184
TOTAL		8.205

Pencapaian PAD

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun (Tabel 8)



*s.d. 31Maret 2020

Tingkat pencapaian PAD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tergolong cukup tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan ketercapaian PAD di tahun 2019 yaitu sebesar 103.21% dari tahun 2018. Untuk perencanaan di tahun 2020, direncanakan target pendapatan sebesar Rp. 81.751.350.000,- yang terdiri dari retribusi IMB, IMTA, , Trayek Angkutan. Demikian pada tahun 2021, rencana pendapatan diproyeksikan minimal sama dengan tahun 2020 dengan catatan akan disesuaikan dengan potensi pada tahun berjalan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- A. Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menanamkan modalnya. Penanam modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN. Hal ini berdampak pula pada investasi di Kabupaten Gresik dikarenakan beberapa keunggulan berinvestasi di Kabupaten Gresik yaitu :
- ✓ Posisi yang strategis
 - ✓ Potensi ekonomi
 - ✓ Ketersediaan lahan dan potensi pengembangan kawasan
 - ✓ Ketersediaan daya dukung produksi
 - ✓ Potensi tenaga kerja dan pasar yang berlimpah
 - ✓ Kemudahan proses perizinan
 - ✓ Jaminan keamanan berinvestasi
- B. Gejolak perekonomian global yang tak kunjung selesai menyebabkan munculnya beberapa masalah diantaranya :
- ✓ Pemutusan hubungan kerja secara massal
 - ✓ Ketidakpastian perkembangan harga komoditas
 - ✓ Meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak operasional
- C. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pelaksanaan PTSP di daerah harus segera dilaksanakan, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
- ✓ Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli
 - ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana
 - ✓ Deregulasi sektoral belum maksimal sehingga pelaksanaan regulasi di daerah masih belum optimal.
 - ✓ Penerapan sistem *Online Single Submission* dalam pelayanan izin masih menemui banyak kendala.

- D. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik rata-rata pertahun diatas 7% dengan distribusi kontribusi sector industry sebesar 49,98% dan perdagangan dan jasa 23,9%. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Kabupaten Gresik masih menginginkan pertumbuhan ekonomi 7%, maka sector industry diperlukan penambahan lahan baru. Ketersediaan lahan tidak terlepas dari kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 terdapat 6 program dan 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 10.779.526.185,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2021 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021

Kabupaten Gresik (Tabel 9)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				250.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				250.000	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft rancangan peraturan	125.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft rancangan peraturan	125.000	
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft evaluasi	125.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft evaluasi	125.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				375.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				375.000	
3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	1 draft rancangan peraturan	125.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	1 draft rancangan peraturan	125.000	
4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	1 kajian	250.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	1 kajian	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Promosi Penanaman Modal					Program Promosi Penanaman Modal					
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				518.500	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				518.500	
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	1 paket video dan 1 paket profil investasi	130.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	1 paket video dan 1 paket profil investasi	130.000	
6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	2 kali pameran	388.500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	2 kali pameran	388.500	
	Program Pelayanan Penanaman Modal					Program Pelayanan Penanaman Modal					
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.410.650	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.410.650	
7	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	1350	485.650	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	1350	485.650	
8	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	245 izin/rekomendasi	682.104	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	245 izin/rekomendasi	682.104	
9	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	475 izin/rekomendasi	117.896	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	475 izin/rekomendasi	117.896	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Nonperizinan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	100	125.000	Nonperizinan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	100	125.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota				288.728	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota				288.728	
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	1. 800 laporan 2. 40 perusahaan	90.134	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	1. 800 laporan 2. 40 perusahaan	90.134	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	8 pembinaan, 295 peserta	58.628	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	8 pembinaan, 295 peserta	58.628	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	134 perusahaan	139.966	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	134 perusahaan	139.966	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				108.500	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				108.500	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota					yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota					
14	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	1 tahun	108.500	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	1 tahun	108.500	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah					
	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.500	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.500	
15	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	115.500	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	115.500	
	Administrasi Keuangan				223.000	Administrasi Keuangan				223.000	
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	- Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM	- 2 dokumen - 10 buku	208.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	- Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM	- 2 dokumen - 10 buku	208.000	
17	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	13 dokumen	70.000	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	13 dokumen	70.000	
	Administrasi Umum					Administrasi Umum					
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	875 surat	755.180	Penyusunan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	875 surat	755.180	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air	3 jasa	703.444,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air	3 jasa	703.444,1	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM PTSP	dan listrik Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	13 unit	163.080	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM PTSP	dan listrik Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	13 unit	163.080	
21	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	DPM PTSP	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	- 1 paket - 1 paket	436.500	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	DPM PTSP	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	- 1 paket - 1 paket	436.500	
22	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	5 jenis	330.900	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	5 jenis	330.900	
23	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	56 jenis	180.635	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	56 jenis	180.635	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 jenis	155.745	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 jenis	155.745	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat listrik	10 jenis	15.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat listrik	10 jenis	15.225	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	2.440.935	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	2.440.935	
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	4 jenis	9.692	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	4 jenis	9.692	
28	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	211 orang	85.200	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	211 orang	85.200	
29	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	124 kali	212.391	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	124 kali	212.391	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	56.680	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	56.680	
31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	8 macam pemeliharaan	1.539.300	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	8 macam pemeliharaan	1.539.300	
32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM PTSP	Jumlah	6 jenis	38.800	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM PTSP	Jumlah	6 jenis	38.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rpjuta)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rpjuta)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Berkala Mebelair		perawatan dan perbaikan mebelair			Berkala Mebelair		perawatan dan perbaikan mebelair			
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				310.940	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				310.940	
33	Peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah peningkatan SDM SKPD	2 paket	310.940	Peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah peningkatan SDM SKPD	2 paket	310.940	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Gresik (Tabel 10)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft rancangan peraturan	
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1 draft evaluasi	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				
3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	1 draft rancangan peraturan	
4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	1 kajian	
	Program Promosi Penanaman Modal				
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	1 paket video dan 1 paket profil investasi	
6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	2 kali pameran	
	Program Pelayanan Penanaman Modal				
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
7	Penyediaan Pelayanan Terpadu	DPM PTSP	Jumlah izin/	1350	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi		
8	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	245 izin/ rekomendasi	
9	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	475 izin/ rekomendasi	
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana atau notifikasi izin	100	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	1. 800 laporan 2. 40 perusahaan	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	8 pembinaan, 295 peserta	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	134 perusahaan	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota				
14	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	1 tahun	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				
	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
15	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	
	Administrasi Keuangan				
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DPM PTSP	- Jumlah dokumen	- 2 dokumen - 10 buku	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM		
17	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	13 dokumen	
	Administrasi Umum				
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	875 surat	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jasa	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	13 unit	
21	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	DPM PTSP	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	- 1 paket - 1 paket	
22	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	5 jenis	
23	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	56 jenis	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 jenis	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah alat listrik	10 jenis	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	4 jenis	
28	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	211 orang	
29	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	124 kali	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	
31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	8 macam pemeliharaan	
32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	DPM PTSP	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	6 jenis	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
33	Peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah	2 paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			peningkatan SDM SKPD		

Pada prinsipnya, setelah diadakan *forum grup discussion* melalui Forum SKPD oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, stakeholder terkait termasuk elemen masyarakat yang diundang menunjukkan respon yang positif atas kegiatan yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Sehingga seluruh kegiatan didukung oleh seluruh komponen stakeholders. Namun demikian tuntutan peningkatan pelayanan dan optimalisasi perizinan online menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan dan diberikan alokasi anggaran di tahun 2021.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi (Tabel 11)

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 	Kewenangan pemrosesan izin sebagian masih berada pada instansi – instansi teknis
2	Kewenangan penerbitan izin investasi diatas >10 milyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 	Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupate/kota.
3	Pelaksanaan OSS (One Single submission)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	Penerapan OSS belum resmi diterapkan di daerah namun SPIPSE sebagai sistem pelayanan perizinan investasi sebagai sistem yang diterapkan sebelumnya, telah dihentikan
4	Regulasi dan kebijakan yang <i>out of date</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 	Regulasi yang menjadi acuan dalam dokumen-dokumen

		Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota	sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan di daerah perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini
--	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk merealisasikan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan misi ke-1 : ***“Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi”***, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : *Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusivitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi di daerah*
 Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran : *Meningkatnya angka investasi*

Untuk mewujudkan misi ke-2 : ***“Meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas”***, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut: *Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusivitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi di daerah*

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran: *Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan*

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :
 - Visi : Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas
 - Misi ke 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :
 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
 - Kewenangan penerbitan izin investasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2021 ada 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 10.779.526.185,-

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 serta ringkasan prioritas permasalahan penanaman modal dan perizinan tahun 2021 dan program/kegiatan utama untuk menyelesaikannya.

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN (Tabel 12)

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
1	Masih diperlukannya program penataan administrasi pada setiap OPD dalam rangka pelaksanaan ketatusahaan lembaga atau badan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kompetensinya ▪ Peningkatan sarana prasarana kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			- Kegiatan Administrasi Umum			- Kegiatan Administrasi Umum			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat terkirim	1. 875 surat	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat terkirim	1. 875 surat	
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2. 3 jasa	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2. 3 jasa	
			3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3. Jumlah jasa kebersihan kantor	3. 1 paket	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3. Jumlah jasa kebersihan kantor	3. 1 paket	
			4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Jumlah perbaikan dan peralatan kerja	4. 5 jenis	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4. Jumlah perbaikan dan peralatan kerja	4. 5 jenis	
			5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Jumlah alat tulis kantor	5. 56 jenis	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Jumlah alat tulis kantor	5. 56 jenis	
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6. 4 jenis	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6. 4 jenis	
			7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Jumlah alat listrik	7. 10 jenis	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7. Jumlah alat listrik	7. 10 jenis	
			8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8. 20 jenis	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8. 20 jenis	
9. Penyediaan Bahan Bacaan	9. Jumlah jenis surat kabar dan	9. 4 jenis	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9. Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	9. 4 jenis				
			10. Penyediaan Makanan dan	10. Jumlah makan dan minum	10. 211 orang				
					11. 124 kali				
					12. 26 orang				

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
			dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	bahan bacaan 10. Jumlah makan dan minum 11. Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12. Jumlah jasa administrasi kantor 13. Jumlah jasa keamanan kantor	10. 211 orang 11. 124 kali 12. 26 orang 13. 1 paket	Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	11. Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah 12. Jumlah jasa administrasi kantor 13. Jumlah jasa keamanan kantor	13. 1 paket	
2	Masih belum memadainya sarana dan prasarana aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik, sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang prima dan profesional, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat serta dunia usaha	Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Administrasi Umum 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4 2. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4 3. Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan 4. Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	1. 1 unit 2. 13 unit 3. 8 macam pemeliharaan 4. 6 jenis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Administrasi Umum 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4 2. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4 3. Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan 4. Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	1. 1 unit 2. 13 unit 3. 8 macam pemeliharaan 4. 6 jenis	
3	Masih rendahnya kinerja aparatur pada Dinas Penanaman	Meningkatkan kinerja aparatur pada Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
	Modal dan PTSP Kab. Gresik	Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik	- Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program 1. Peningkatan SDM SKPD	1. Jumlah peningkatan SDM SKPD	1. 2 paket	- Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program 1. Peningkatan SDM SKPD	1. Jumlah peningkatan SDM SKPD	1. 2 paket	
4	Belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik	Meningkatnya kinerja dan tercapainya akuntabilitas setiap kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	1. Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2. Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi 4. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	1. 2 dokumen 2. 10 buku 3. 2 dokumen 4. 13 dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	1. Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2. Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi 4. Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	1. 2 dokumen 2. 10 buku 3. 2 dokumen 4. 13 dokumen	
5	Kurangnya aspek promosi dan kerjasama investasi dalam upaya menarik investor di Kab. Gresik	Meningkatnya daya saing Kab.Gresik sebagai Kabupaten yang memiliki potensi besar untuk sasaran investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Kegiatan Penetapan Pemberian			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal			

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
			Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/ Kota 2. Penyediaan Peta dan Peluang Usaha Kab/Kota Program Promosi Penanaman Modal - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi	1. Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal 2. Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal 1. Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik 2. Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	1. 1 draft rancangan peraturan 2. 1 draft evaluasi 1. 1 draft rancangan peraturan 2. 1 kajian Usaha Kab/Kota	yang Menjadi Kewenangan 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/ Kota 2. Penyediaan Peta dan Peluang Usaha Kab/Kota Program Promosi Penanaman Modal - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	1. Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal 2. Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal 1. Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik 2. Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	1. 1 draft rancangan peraturan 2. 1 draft evaluasi 1. 1 draft rancangan peraturan 2. 1 kajian Usaha Kab/Kota	

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
			Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kab/Kota 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah video profil penanaman modal 2. Jumlah pameran investasi 1. Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	1. 1 paket video dan 1 paket profil investasi 2. 2 kali pameran 1. 1 tahun	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kab/Kota 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah video profil penanaman modal 2. Jumlah pameran investasi 1. Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	1. 1 paket video dan 1 paket profil investasi 2. 2 kali pameran 1. 1 tahun	

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
6	Masih rendahnya koordinasi antar lembaga terkait tentang potensi dan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik	Meningkatnya pelayanan penerbitan izin	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal - Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal 2. Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal 3. Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	1. – 800 laporan perusahaan - 40 perusahaan 2. 8 pembinaan, 295 peserta 3. 134 perusahaan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal - Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal 2. Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal 3. Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	1. – 800 laporan perusahaan - 40 perusahaan 2. 8 pembinaan, 295 peserta 3. 134 perusahaan	
7.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Sebagai fungsi pelayanan, tahun 2018	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu yang prima	Program Pelayanan Penanaman Modal - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal			Program Pelayanan Penanaman Modal - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			

No	Latar Belakang/ Permasalahan	Sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Indikator	Target	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik telah menerbitkan izin sebanyak 9.695 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima) pemohon izin. Oleh karena itu diperlukan operasional dalam melayani pemohon.		yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota			Kab/Kota			
			1. Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	1. 1350	1. Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	1. 1350	
			2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	2. Jumlah izin/rekomendasi yang terbit	2. 245 izin/rekomendasi	2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	2. Jumlah izin/rekomendasi yang terbit	2. 245 izin/rekomendasi	
			3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	3. Jumlah izin/rekomendasi yang terbit	3. 475 izin/rekomendasi	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	3. Jumlah izin/rekomendasi yang terbit	3. 475 izin/rekomendasi	
			4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4. Jumlah fasilitasi pelayanan izin/rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	4. 100	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4. Jumlah fasilitasi pelayanan izin/rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	4. 100	

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Gresik (Tabel 13)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
2.18.02.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				250.000				250.000
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000	APBD		Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000	APBD		Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				375.000				375.000
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM	125.000	APBD		Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM	125.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Kab. Gresik				Kab. Gresik	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	250.000	APBD		Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	250.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal								
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				518.500				518.500
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah video profil penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	130.000	APBD		Jumlah video profil penanaman modal	130.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran investasi	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	388.500	APBD		Jumlah pameran investasi	388.500
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal								
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.410.650				1.410.650
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	485.650	APBD		Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	485.650
2.18.04.2.01.02	Pemantauan	Jumlah izin/	DPM PTSP	Jumlah izin/	682.104	APBD		Jumlah izin/	682.104

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	rekomendasi/ yang terbit		rekomendasi/ yang terbit				rekomendasi/ yang terbit	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	117.896	APBD		Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	117.896
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	125.000	APBD		Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	125.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota				288.728				288.728
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	90.134	APBD		1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	90.134
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan	Jumlah	DPM PTSP	Jumlah	58.628	APBD		Jumlah	58.628

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaksanaan pembinaan penanaman modal		pelaksanaan pembinaan penanaman modal				pelaksanaan pembinaan penanaman modal	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	139.966	APBD		Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	139.966
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				108.500				108.500
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota								
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	108.500	APBD		Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	108.500
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah								
2.18.01.2.01	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.500				115.500
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	115.500	APBD		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	115.500
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan				223.000				223.000
2.18.01.2.02.06	Penyusunan Laporan	- Jumlah	DPM PTSP	- Jumlah	208.000	APBD		- Jumlah	208.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM		dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM				dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM	
2.18.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	70.000	APBD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	70.000
2.18.01.2.03	Administrasi Umum								
2.18.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	755.180	APBD		Jumlah surat terkirim	755.180
2.18.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	703.444,1	APBD		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	703.444,1
2.18.01.2.03.06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	163.080	APBD		Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	163.080
2.18.01.2.03.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	DPM PTSP	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	436.500	APBD		- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	436.500
2.18.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	330.900	APBD		Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	330.900
2.18.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	180.635	APBD		Jumlah alat tulis kantor	180.635
2.18.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah jenis barang cetakan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetakan	155.745	APBD		Jumlah jenis barang cetakan	155.745

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penggandaan	dan penggandaan		dan penggandaan				dan penggandaan	
2.18.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listik	DPM PTSP	Jumlah alat listik	15.225	APBD		Jumlah alat listik	15.225
2.18.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2.440.935	APBD		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2.440.935
2.18.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	9.692	APBD		Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	9.692
2.18.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	85.200	APBD		Jumlah makan dan minum	85.200
2.18.01.2.03.18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	212.391	APBD		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	212.391
2.18.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	56.680	APBD		Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	56.680
2.18.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	1.539.300	APBD		Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	1.539.300
2.18.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	DPM PTSP	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	38.800	APBD		Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	38.800
2.18.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				310.940				310.940
2.18.01.2.04.09	Peningkatan SDM SKPD	Jumlah peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah peningkatan SDM SKPD	310.940	APBD		Jumlah peningkatan SDM SKPD	310.940

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik merencanakan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh empat) subkegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 10.779.526.185,-. Program dimaksud terdiri dari:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.115.500.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.278.000.000,-
3. Kegiatan Administrasi Umum, terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.7.123.708.185,-
4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.310.940.000,-
5. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.250.000.000,-
6. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.375.000.000,-
7. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.518.500.000,-
8. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.1.410.650.000,-
9. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.288.728.000,-
10. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp.108.500.000,-

Berikut disajikan pula rencana kegiatan beserta jumlah pendanaan setiap kegiatan secara detail pada tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH(Tabel 14)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
2.18.02.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				250.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000	APBD
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125.000	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				375.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	125.000	APBD
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	250.000	APBD
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal					
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				518.500	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah video profil penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	130.000	APBD
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran investasi	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	388.500	APBD
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal					
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara				1.410.650	

	Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	485.650	APBD
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	682.104	APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	DPM PTSP	Jumlah izin/rekomendasi/ yang terbit	117.896	APBD
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/rekomendasi/ dana tau notifikasi izin	125.000	APBD
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				288.728	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	90.134	APBD
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	58.628	APBD
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	139.966	APBD
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				108.500	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota					
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah	108.500	APBD

	Terintegrasi secara Elektronik	pemeliharaan sarana dan prasarana TI		pemeliharaan sarana dan prasarana TI		
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah					
2.18.01.2.01	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115.500	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	115.500	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan				223.000	
2.18.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM 	DPM PTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dokumen SKM 	208.000	APBD
2.18.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	70.000	APBD
2.18.01.2.03	Administrasi Umum					
2.18.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	755.180	APBD
2.18.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	703.444,1	APBD
2.18.01.2.03.06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	163.080	APBD
2.18.01.2.03.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor 	DPM PTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor 	436.500	APBD
2.18.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	330.900	APBD
2.18.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	180.635	APBD
2.18.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	155.745	APBD
2.18.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	DPM PTSP	Jumlah alat listrik	15.225	APBD
2.18.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2.440.935	APBD
2.18.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	9.692	APBD

2.18.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	85.200	APBD
2.18.01.2.03.18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	212.391	APBD
2.18.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	56.680	APBD
2.18.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	1.539.300	APBD
2.18.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	DPM PTSP	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	38.800	APBD
2.18.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				310.940	
2.18.01.2.04.09	Peningkatan SDM SKPD	Jumlah peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah peningkatan SDM SKPD	310.940	APBD

BAB V PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

Gresik, **17 4 JUL 2020**
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1001

MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				625,000.00	
2.18.02.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan				250,000.00	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125,000.00	APBD
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah draft evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	125,000.00	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				375,000.00	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah draft rancangan peraturan tentang RUPM Kab. Gresik	125,000.00	APBD
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	DPM PTSP	Jumlah ketersediaan kajian tentang peta potensi dan peluang usaha di Kab. Gresik	250,000.00	APBD
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				518,500.00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				518,500.00	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah video profil penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah video profil penanaman modal	130,000.00	APBD
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran investasi	DPM PTSP	Jumlah pameran investasi	388,500.00	APBD
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				1,410,650.00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1,410,650.00	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ persetujuan/ sertifikasi/ pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	485,650.00	APBD
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	682,104.00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	DPM PTSP	Jumlah izin/ rekomendasi/ yang terbit	117,896.00	APBD
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau nootifikasi izin	DPM PTSP	Jumlah fasilitasi pelayanan izin/ rekomendasi/ dana tau nootifikasi izin	125,000.00	APBD
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				288,728.00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/ Kota				288,728.00	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	DPM PTSP	1. Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan laporan kegiatan penanaman modal 2. Jumlah kegiatan pemantauan penanaman modal	90,134.00	APBD
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanaman modal	58,628.00	APBD
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan pengawasan perizinan	139,966.00	APBD
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				108,500.00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/ Kota				108,500.00	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	DPM PTSP	Jumlah data perizinan dan nonperizinan serta jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana TI	108,500.00	APBD
2.18.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				7,828,148.19	
2.18.01.2.01	Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				115,500.00	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	115,500.00	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan				278,000.00	
2.18.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPM PTSP	- Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	208,000.00	APBD
2.18.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	70,000.00	APBD
2.18.01.2.03	Administrasi Umum				7,123,708.19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(000)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	DPM PTSP	Jumlah surat terkirim	755,180.00	APBD
2.18.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPM PTSP	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	703,445.16	APBD
2.18.01.2.03.06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4	163,080.00	APBD
2.18.01.2.03.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	DPM PTSP	- Jumlah jasa keamanan kantor - Jumlah jasa kebersihan kantor	436,500.00	APBD
2.18.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	DPM PTSP	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	330,900.00	APBD
2.18.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	DPM PTSP	Jumlah alat tulis kantor	180,635.00	APBD
2.18.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	DPM PTSP	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	155,745.00	APBD
2.18.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik	DPM PTSP	Jumlah alat listrik	15,225.00	APBD
2.18.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	DPM PTSP	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2,440,935.00	APBD
2.18.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	DPM PTSP	Jumlah jenis surat kabar dan bahan bacaan	9,692.03	APBD
2.18.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum	DPM PTSP	Jumlah makan dan minum	85,200.00	APBD
2.18.01.2.03.18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	DPM PTSP	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	212,391.00	APBD
2.18.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	DPM PTSP	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan roda 4	56,680.00	APBD
2.18.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	DPM PTSP	Jumlah macam pemeliharaan gedung dan bangunan	1,539,300.00	APBD
2.18.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	DPM PTSP	Jumlah perawatan dan perbaikan mebelair	38,800.00	APBD
2.18.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				310,940.00	
2.18.01.2.04.09	Peningkatan SDM SKPD	Jumlah peningkatan SDM SKPD	DPM PTSP	Jumlah peningkatan SDM SKPD	310,940.00	APBD
TOTAL					10,779,526.19	